

POLITIK UANG (*MONEY POLITICS*) DALAM PEMILIHAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF

¹Muhammad Roy,²Erens E. Koodoh³Rahmat Sewa Suraya

^{1,2,3}Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Tridarma Anduonohu Jl.H.E.A. Mokodompit, Kendari, 93232, Indonesia

*Email Koresponden: ahmat.keke76@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hal-hal yang mendasari terjadinya praktik politik uang dalam pemilihan calon legislatif DPRD Kabupaten Konawe Selatan di Kecamatan Laonti. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Sampling snowball*. Penelitian ini menggunakan teori Scoot (1990) "*Domination and The Arts of Resistance: Hidden Transcripts*" dan pemikiran Fried, dalam Balandier (1986) "*Antropologi Politik*". Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh praktik politik uang dalam pemilihan calon legislatif di Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe membawa dampak yang sangat besar terhadap masyarakat. Adapun hal-hal yang mendasari terjadinya praktik politik uang pada pelaksanaan pemilihan calon legislatif DPRD Kabupaten Konawe Selatan di Kecamatan Laonti, yaitu ; Minimnya pengetahuan tentang politik, keinginan mendapatkan dukungan secara instan, rendahnya tingkat pendidikan dan latar belakang ekonomi kurang mampu.

Kata Kunci : Calon Legislatif, Politik Uang.

ABSTRACT

This study aims to examine the things that underlie the occurrence of money politics practices in the selection of legislative candidates for the South Konawe Regency DPRD in Laonti District. The selection of informants in this study uses the snowball sampling technique. This study uses the theory of Scoot (1990) "Domination and The Arts of Resistance: Hidden Transcripts" and Fried's thought, in Balandier (1986) "Political Anthropology". Data collection techniques used in this study were interview, observation and documentation techniques. This research was conducted using qualitative methods. The results showed that the influence of money politics practices in the selection of legislative candidates in Laonti District Konawe District had a very large impact on society. The things that underlie the occurrence of money politics practices in the election of legislative candidates for the South Konawe Regency DPRD in Laonti District, namely; The lack of knowledge about politics, the desire to get instant support, the low level of education and economic background of the underprivileged.

Keywords: Legislative Candidates, Money Politics.

PENDAHULUAN

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Sri Utari (2016) mengenai Pencegahan Politik Uang dan Penyelenggaraan Pilkada yang Berkualitas: Sebuah Revitalisasi Ideologi, menunjukkan hasil penelitian bahwa praktik Politik Uang terjadi pada semua tahapan Pilkada, mulai tahap sebelum, selama, dan pasca pemilihan yakni pada tahap penjurian bakal calon, seleksi administrasi, tahap pendataan pemilih, tahap kampanye, dan tahap pemungutan suara. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa menjelang pemungutan suara sering terjadi “serangan fajar”, peristiwa ini menunjuk pada penyogokan yang dilakukan para calon dan tim suksesnya untuk memobilisasi dukungan pada saat pemungutan suara dilakukan.

Praktik politik uang di Indonesia tumbuh sangat subur. Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap praktik *money politik* merupakan suatu kewajaran, sehingga masyarakat tidak lagi peka terhadap bahaya-bahaya yang akan timbul dikarenakan praktik-praktik *money politik* ini. Masyarakat membiarkan tindakan ini, karena tidak merasa bahwa *money politik* secara normatif harus dihindari. Sehingga semua itu berjalan seakan-akan merupakan suatu hal yang wajar. Kendati jelas terjadi *money politik*, dan hal itu diakui oleh kalangan masyarakat, namun tidak ada protes (Simatupang & Subekhan, 2018).

Kecamatan Laonti adalah salah satu daerah yang terletak di Kabupaten Konawe Selatan, memiliki lebih dari satu sistem kekerabatan yang jumlah anggota pada masing-masing kekerabatan dinilai sangat banyak. Sistem kekerabatan yang terdapat di Kecamatan Laonti bersifat patrilineal. Hal tersebut dapat dilihat dari masyarakatnya yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki sehingga selalu dihubungkan dengan garis keturunan bapak. Bagi masyarakat patrilineal, laki-laki mendapat penghargaan dan penghormatan lebih tinggi dari pada kaum wanita. Akan tetapi, meskipun sistem kekerabatan di Kecamatan Laonti bersifat patrilineal, dalam praktiknya masyarakat Laonti cenderung menunjukkan perilaku kekerabatan yang bersifat parental. Sifat parental yang dimaksud yaitu, masyarakat Laonti membangun kedekatan emosional yang sama antara keluarga dari pihak bapak maupun pihak ibu. Hubungan emosional dari kedua belah pihak itulah yang menjadikan sistem kekerabatan pada masyarakat Kecamatan Laonti menjadi lebih besar dan tersimpul.

Masyarakat Kecamatan Laonti melakukan aktifitas seperti masyarakat pada umumnya. Hubungan Kekerabatan yang membentuk kedekatan emosional menjadikan masyarakatnya lebih menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan patuh terhadap kaidah dan norma yang berlaku di masyarakat. Perilaku yang menjadi ciri khas masyarakat pedesaan sangat jelas terlihat pada masyarakat Kecamatan Laonti khususnya budaya gotong royong.

Hal tersebut dapat dilihat dari upaya masyarakat dalam menjalin kerja sama yang baik pada pesta pernikahan, kerja sama dalam membantu proses kelahiran/bersalin, kerjasama dalam membantu urusan kedukaan/kematian dan lain-lain. Sistem kekerabatan yang terdapat di Kecamatan Laonti diharapkan dapat

berperan dalam membantu anggota kerabatnya untuk menang pada setiap kontestasi politik khususnya pada pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan.

Kecamatan Laonti maupun yang berasal dari luar untuk melakukan praktik politik uang dengan cara membeli atau membayar suara pemilih. Politik uang adalah penyebab utama tidak berfungsinya sistem kekerabatan dalam pemilihan calon legislatif di Kecamatan Laonti sehingga selama tiga kali penyelenggaraan pemilihan calon legislatif di Kabupaten Konawe Selatan tidak pernah ada calon yang berasal dari Kecamatan Laonti berhasil terpilih pada pemilihan tersebut.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan. Alasan penulis memilih lokasi di Kecamatan Laonti karena daerah tersebut merupakan sasaran praktik politik uang dalam pelaksanaan pesta demokrasi seperti pemilihan kepala desa, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah.

Calon legislatif yang berasal dari Kecamatan Laonti belum pernah terpilih sebagai anggota DPRD, padahal calon legislatif dari Kecamatan Laonti yang ikut dalam pemilihan legislatif memiliki basis masa kekerabatan yang cukup besar. Selain itu, Kecamatan Laonti juga belum pernah menjadi lokasi penelitian mengenai politik kekerabatan maupun politik uang sehingga mendorong minat peneliti untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, terlibat langsung dengan masalah penelitian dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan Teknik *Sampling snowball*. Teknik *Sampling snowball* adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Dalam *Sampling snowball*, identifikasi awal dimulai dari seseorang atau kasus yang masuk dalam kriteria penelitian. Kemudian berdasarkan hubungan keterkaitan langsung maupun tidak langsung dalam suatu jaringan, dapat ditemukan responden berikutnya atau unit sampel berikutnya. Demikian seterusnya proses *Sampling* ini berjalan sampai didapatkan informasi yang cukup dan jumlah sampel yang memadai dan akurat untuk dapat dianalisis guna menarik kesimpulan penelitian (Nurdiani, 2014).

Informan kunci dalam penelitian ini adalah Bapak Ashar, S.Sos., M.Si (45 Tahun) selaku Camat Laonti. Adapun informan biasa dalam penelitian ini berjumlah 3 orang yakni Bapak Nakman, S.Pd (31 Tahun) selaku mantan calon legislatif yang tidak terpilih pada periode 2014-2019, Bapak Rahmat Efendi, S.Si selaku Sekretaris Desa Ulusawa Kecamatan Laonti yang juga terlibat sebagai tim sukses pada pelaksanaan pemilihan calon legislatif di Kecamatan Laonti dan Bapak P (Inisial) (29 Tahun) selaku masyarakat Laonti.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Observasi pada penelitian ini berjalan selama kurang lebih satu bulan yang dilakukan hampir di semua desa yang terdapat di Kecamatan Laonti, mulai dari wilayah barat, wilayah darat sampai dengan wilayah timur. Proses observasi tersebut bertujuan untuk melihat dan mengamati sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih serta mengamati respon masyarakat terhadap praktik politik uang. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat mengharapkan adanya pemberian uang menjelang hari H pemungutan suara dengan istilah "serangan fajar". Banyak dari masyarakat yang secara terbuka menyatakan akan memberikan dukungan kepada calon legislatif yang memberikan uangnya.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dan mendalam guna mendapat informasi secara jelas. Informan pertama yang bersedia memberikan informasi pada penulis yaitu Bapak Rahmat Efendi, S.Si (29) yang juga menjabat sebagai Sekretaris Desa Ulusawa Kecamatan Laonti, beliau memberikan informasi seputar praktik politik uang dan penyebab terjadinya politik uang dengan cukup jelas. Akan tetapi beliau tidak bisa memberikan informasi mengenai dinamika politik yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan calon legislatif di Kecamatan Laonti secara rinci sehingga ia merekomendasikan penulis untuk bertemu dengan salah satu pemuda di Kecamatan Laonti yang juga pernah mencalonkan diri pada pemilihan legislatif periode 2014-2019 meskipun tidak terpilih, pemuda tersebut adalah Bapak Nakman, S.Pd (31). Bapak Nakman memberikan informasi seputar politik uang serta hal-hal yang mendasari terjadinya praktik politik uang dengan cukup baik dan rinci.

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Nakman, penulis diarahkan untuk melakukan wawancara dengan Bapak Ashar, S.Sos., M.Si (45) selaku camat Laonti guna mendapatkan informasi seputar pengaruh politik uang pada pemilihan calon legislatif dan penyebab masyarakat Laonti menjadi target politik uang. Proses wawancara yang penulis lakukan dengan camat Laonti berjalan dengan sangat lancar, selain itu penulis yang juga merupakan masyarakat Laonti diberikan nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat.

Setelah melakukan wawancara bersama camat Laonti, dengan jarak waktu yang cukup lama penulis melakukan wawancara dengan informan yang pernah beberapa kali menjadi tim sukses pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif, informan tersebut cukup mengetahui secara rinci mengenai pengaruh politik uang dan masalah yang ditimbulkan dari praktik politik uang. Karena informan tersebut enggan untuk dituliskan namanya, demi menjaga privasi informan yang bersangkutan maka penulis menggunakan inisial 'P' dalam penulisan nama. Informan berinisial 'P'(29) tersebut memberikan informasi secara rinci sehingga data yang penulis butuhkan secara perlahan terjawab dengan baik.

Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami. Patton (1990) berpendapat bahwa tidak ada cara yang paling benar secara absolut untuk mengorganisasi, menganalisis, dan menginterpretasikan data kualitatif. Karena itu, maka prosedur analisis data dalam penelitian ini didasarkan kepada sejumlah teori (Creswell, 1994; Patton, 1990; Bogdan & Taylor, 1984) dan disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Penelitian ini menggunakan proses analisis data kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara mengaitkan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti dengan teori yang digunakan dalam penelitian. Analisis pada penelitian ini memadukan antara perspektif etik (pandangan peneliti) dan perspektif emik (pandangan informan/masyarakat).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut penyajian data dalam bentuk tabel banyaknya jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih pada pelaksanaan Pemilihan Umum di Kecamatan Laonti:

Tabel 1. Laporan Perkembangan Proses Coklit PPK Kecamatan Laonti Tahun 2018

NO	DESA	JUMLAH PEMILIH	JUMLAH PEMILIH YANG DI COKLIT	% PEMILIH SUDAH DICOKLIT
1	2	5	6	7
1	BATU JAYA	309	309	100%
2	NAMU	338	338	100%
3	MALARINGGI	375	375	100%
4	TUE - TUE	291	291	100%
5	CEMPEDAK	411	411	100%
6	LABUAN BEROPA	1.017	1017	100%
7	LABOTA ONE	784	784	100%
8	TAMBEANGA	702	702	100%
9	WORU - WORU	358	358	100%
10	WANDAEHA	253	253	100%
11	TAMBOLOSU	889	889	100%
12	RUMBI - RUMBIA	411	411	100%
13	PEO INDAH	216	216	100%
14	LAONTI	333	333	100%
15	PUUNDIRANGGA	412	412	100%
16	KONDONO	439	439	100%
17	LAWISATA	283	283	100%
18	ULUSAWA	764	764	100%
19	SANGI - SANGI	967	967	100%
TOTAL		9.552	9.552	100%

Berdasarkan penyajian tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah masyarakat Kecamatan Laonti yang terdaftar sebagai pemilih adalah sebanyak 9.552 orang. Jumlah tersebut tentunya sangat berpotensi dalam mengantarkan calon legislatif yang berasal dari Kecamatan Laonti menang pada Pemilihan Legislatif Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Total jumlah pemilih tersebut dinilai cukup untuk memenangkan lebih dari 1 calon legislatif yang berasal dari Kecamatan Laonti. Hal tersebut diketahui berdasarkan hitungan masing-masing calon legislatif di Daerah Pilihan (Dapil) 4 Kabupaten Konawe Selatan untuk berada di posisi aman harus memperoleh sebanyak 1.500 suara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemilih di Kecamatan Laonti yang berjumlah 9.552 mestinya mampu membawa 6 orang calon legislatif untuk berada di posisi aman.

Kenyataannya bahwa dalam setiap pelaksanaan pemilihan calon legislatif di Kecamatan Laonti yang dimulai sejak Periode 2004-2009, Periode 2009-2014, Periode 2014-2019 dan Periode 2019-2024, suara masyarakat Laonti tidak pernah berhasil memenangkan calon legislatif dengan jumlah lebih sesuai dengan jumlah pemilih di Kecamatan Laonti. Masyarakat Laonti baru berhasil memenangkan satu orang calon legislatif pada Periode 2019-2024 dengan perolehan suara sebesar 1.654 yang berasal dari pemilih Kecamatan Laonti. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak suara masyarakat Laonti yang tidak membuahkan hasil pada pemilihan legislatif.

Beberapa periode pelaksanaan pemilihan calon legislatif di Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan menunjukkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya bersatu dalam mendukung calon legislatif yang berasal dari Kecamatan Laonti. Tentunya ada hal yang mempengaruhi sehingga kekerabatan di tengah masyarakat tidak sepenuhnya berfungsi sebagai alat untuk menyatukan pilihan. Salah satu penyebabnya adalah maraknya praktik politik uang yang terjadi pada setiap pelaksanaan pemilihan di Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan.

Terjadinya Politik Uang di Kecamatan Laonti

Politik uang atau yang dikenal dengan sebutan "*money politics*" adalah salah satu kecurangan yang terjadi hampir pada setiap pelaksanaan pemilihan di berbagai daerah di Indonesia, baik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) seperti Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati & Wakil Bupati dan Pemilihan Walikota & Wakil Walikota, maupun Pemilihan Legislatif seperti Pemilihan Calon Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Indonesia sebagai negara demokrasi tentu melarang terjadinya politik uang dan berbagai kecurangan lainnya dalam pelaksanaan pemilihan yang diselenggarakan mulai dari tingkat paling rendah sampai dengan tingkat nasional. Hal demikian dibuktikan dengan adanya aturan dan undang-undang yang

melarang terjadinya praktik politik uang dan kecurangan lain dengan disertai sanksi yang cukup berat.

Praktik politik uang yang terjadi pada setiap pelaksanaan pemilihan di Kecamatan Laonti tentu mengganggu jalannya proses pemilihan dan merugikan berbagai pihak baik calon legislatif maupun masyarakat secara umum. Namun demikian, politik uang yang terjadi tentu memiliki penyebab dan alasan sehingga praktik tersebut masih terjadi di Kecamatan Laonti.

Minimnya Pengetahuan Tentang Politik

Minimnya sosialisasi dan komunikasi antar masyarakat dan figur-figur calon legislatif yang maju juga menjadi salah satu penyebab terjadinya praktik politik uang di Kecamatan Laonti, hal tersebut terjadi karena tidak adanya edukasi politik yang dilakukan para calon legislatif kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan hadirnya politik uang yang biasa dikenal dengan sebutan "serangan fajar", masyarakat perlu memahami bahwa politik uang menjadi penyebab daripada tidak adanya putra dan putri dari Kecamatan Laonti yang menang pada pemilihan legislatif selama 3 periode sebelumnya. Selain itu terbatasnya ruang komunikasi dan sosialisasi juga menjadi penyebab rendahnya tingkat elektabilitas figur calon di mata kerabat mahkan masyarakat umum yang berasal dari Kecamatan Laonti. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan informan bernama Rahmat Efendi, S.Si (28) berikut ini:

"yang terjadi disana karna seperti ini. Minimnya sosialisasi terhadap keluarga-keluarga disana sebenarnya untuk menguatkan putra-putra daerahnya, minimnya komunikasi, sosialisasi, konsolidasi sehingga memudahkan masuknya politik uang" (Wawancara 6 Juli 2019).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa minimnya sosialisasi dan komunikasi antar calon legislatif dan masyarakat di Kecamatan Laonti menyebabkan tertutupnya ruang edukasi politik kepada masyarakat sehingga masyarakat sangat mudah dipengaruhi dengan hadirnya praktik politik uang serta menyebabkan masyarakat di Kecamatan Laonti selalu menjadi sasaran praktik politik uang yang dilakukan oleh calon legislatif baik yang berasal dari Kecamatan Laonti maupun dari luar Laonti. Selain itu, minimnya sosialisasi dan komunikasi antar masyarakat dan putra-putri Kecamatan Laonti yang tampil sebagai calon legislatif juga membuat para calon tersebut tidak memiliki elektabilitas baik atau tidak dikenal oleh masyarakat luas.

Tidak adanya pihak yang memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bersatu dalam mendukung calon legislatif yang berasal dari Kecamatan Laonti membuat masyarakat rentan terpengaruh dengan politik uang, yakni tidak adanya penguatan untuk menolak politik uang dan mendukung figur kerabat yang berasal dari Kecamatan Laonti. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi politik khususnya

pada manfaat dan tujuan persatuan baik antar calon legislatif dan masyarakat maupun sesama masyarakat membuat mereka kehilangan visi dan misi persatuan yang kemudian menjadi ruang masuknya politik uang untuk memecah belah dukungan kekerabatan dan masyarakat pada umumnya. Yang dilakukan hanyalah sosialisasi kepada tim sukses masing-masing agar mencari data untuk target politik uang pada hari H. Hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Informan berikut ini:

“belum ada yang memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa kalau kita bersatu bisa kita kuat, seperti itu. Sa yakin dan percaya yang bisa dipatahkan untuk *money politics* itu hanya sosialisasi untuk bersatu. kemarin-kemarin kan.. semua caleg tidak ada yang sosialisasi untuk bersatu tidak ada, hanya mensosialisasikan mencari data dari tim sukses untuk *money politics* pada hari H. Tidak ada yang menceritakan partai politik bahwa kalau kita bersatu, kita kuat” (Wawancara 10 Juli 2019).

Kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa minimnya calon legislatif yang memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pentingnya persatuan kekerabatan dan masyarakat secara umum pada pemilihan calon legislatif di Kecamatan Laonti membuat masyarakat kehilangan visi dan motifasi untuk bersatu. Hal tersebut membuat masyarakat dengan mudah terpengaruh oleh hadirnya politik uang yang dilakukan para calon baik dari Kecamatan Laonti maupun dari luar. Edukasi politik kepada masyarakat dinilai mampu untuk membuat masyarakat tidak terpengaruh politik uang.

Wilayah yang terisolir juga menjadi salah satu penyebab sehingga ruang komunikasi dan informasi sangat lambat sehingga masyarakat lamban dalam mengakses dan mempelajari hal-hal menyangkut politik, termasuk memahami buruknya politik uang. Hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

“yang pertama karna daerah kita yang terisolir, dalam hal ini komunikasi informasi itu.. begitu lambat, begitu.. sehingga masyarakat itu tidak cukup untuk pendidikan politik yang seharusnya, toh..” (Wawancara 6 Juli 2019).

Kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa salah satu penyebab terjadinya praktik politik uang di Kecamatan Laonti yaitu keadaan wilayah yang terisolir. Terisolirnya wilayah Kecamatan Laonti membuat jaringan komunikasi dan informasi menjadi terhambat sehingga masyarakat sulit untuk mengakses hal-hal seputar pengetahuan politik. Sebab, dengan pemahaman politik yang baik masyarakat tidak akan mudah terpengaruh dengan hadirnya politik uang di Kecamatan Laonti. Pemerintah setempat perlu memberikan sosialisasi kepada

masyarakat terkait dengan bahaya praktik politik uang yang dapat mengganggu jalannya proses demokrasi yang sehat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga perlu membangun koordinasi yang baik dengan lembaga-lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan dan pemantauan jalannya pemilihan calon legislatif di Kecamatan Laonti seperti Panwasdam, PPK, pihak kepolisian dan semua yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung demi mewujudkan jalannya proses pemilihan secara demokratis dan terhindar dari praktik *money politics* (politik uang).

Keinginan Mendapatkan Dukungan Secara Instan

Kebanyakan calon legislatif yang bertarung tidak mengedepankan kemampuannya dalam meyakinkan masyarakat agar mendapat dukungan berupa suara, kebanyakan dari mereka menginginkan suara secara instan sehingga menurut mereka politik uang menjadi alternatif yang cocok untuk mendapatkan dukungan suara secara instan. Apalagi sangat banyak anak-anak muda yang baru muncul sebagai calon legislatif yang belum memiliki elektabilitas sebagai penunjang untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan informan:

“yang mendasari sebenarnya itu, inilah tadi, hadirnya caleg-caleg yang berkontestasi politik tadi ini inginkan suara secara instan mereka hadir dengan kekuatan uangnya untuk meraih suara. Sementara caleg-caleg yang berkontribusi, yang bersumbangsih terhadap masyarakat jauh hari sebelumnya itu sangat minim caleg-caleg seperti itu didapat, jadi sembilan puluh sembilan persen lebih itu didominasi oleh caleg-caleg pemula. Jadi itu yang pengaruhi sebenarnya. Coba kalau caleg tidak datang dengan uangnya, mana mungkin juga masyarakat mau paksakan minta uang sama caleg” (Wawancara 6 Juli 2019).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa terjadinya politik uang di Kecamatan Laonti disebabkan oleh banyaknya calon legislatif yang menginginkan dukungan masyarakat secara instan sehingga banyak dari mereka yang melakukan praktik politik uang pada pemilihan legislatif. Hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan uang kepada masyarakat guna memperoleh dukungan secara instan. Masyarakat dengan mudah memberikan dukungan terhadap calon legislatif yang memberikan uang disebabkan oleh minimnya calon legislatif yang berasal dari Kecamatan Laonti aktif dalam berkontribusi jauh hari sebelum masa pencalonan tiba.

Menjadi calon legislatif bukanlah hal yang mudah sebab harus dibekali dengan kemampuan yang memadai. Calon legislatif harus aktif dan pandai dalam membangun komunikasi dan memberikan sosialisasi sebagai edukasi politik bagi

masyarakat setempat demi terwujudnya pemilihan yang sehat tanpa politik uang. Selain itu, calon legislatif harus mampu menunjukkan program-program dan rekam jejak yang baik untuk mendapatkan dukungan masyarakat sehingga tidak ada lagi calon legislatif yang menginginkan dukungan secara instan.

Rendahnya Tingkat Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan menjadi hal yang mempengaruhi sehingga masyarakat Kecamatan Laonti selalu menjadi target dari praktik politik uang. Berbeda dengan pelajar dan mahasiswa yang tingkat pemahamannya sudah baik sehingga mereka sedikit mampu untuk memahami politik agar tidak mudah terpengaruh untuk menjadi target politik uang. Berikut hasil wawancara dengan informan:

“faktor pendidikan yang ee.. pendidikan di masyarakat itu mempengaruhi. Contoh bahwa kita anak kuliah dengan orang-orang dikampung itu berbeda kita punya sudut pandang, kita punya ee.. menilai politik itu sendiri. Artinya dari pendidikan” (Wawancara 6 Juli 2019).

Kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa rendahnya pendidikan masyarakat juga sangat mempengaruhi terjadinya praktik politik uang di Kecamatan Laonti. Hal tersebut tidak lain disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat untuk tidak terpengaruh praktik politik uang. Masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang baik seperti pelajar, mahasiswa dan lain-lain tidak akan mudah terpengaruh dengan hal-hal tersebut. Rendahnya SDM dan tingkat pendidikan membuat masyarakat sangat mudah menerima pemberian uang untuk kemudian memberikan dukungan terhadap calon legislatif yang memberikan uangnya. Hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan informan berikut ini:

“masyarakat tersentuh dengan kos politik dipengaruhi oleh kurangnya SDM pemilih, sehingga mereka berkesimpulan praktis. pendidikan politik kurang, pemahamannya kurang” (Wawancara 10 Juli 2019).

“kembali ke pendidikan dan SDM manusia itu sendiri. Rendahnya tingkat pendidikan pemilih disana itu sangat mempengaruhi dan rentan mempengaruhi politik uang” (Wawancara 10 Juli 2019).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa rendahnya SDM dan tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Laonti menjadi salah satu penyebab sehingga masyarakat selalu menjadi target-target politik uang yang dilakukan oleh para calon legislatif melalui tim suksesnya. Selain itu rendahnya SDM dan

pendidikan masyarakat juga membuat Kecamatan Laonti menjadi daerah yang rentan dengan aktifitas *money politics* (politik uang).

Latar Belakang Ekonomi Kurang Mampu

Latar belakang ekonomi masyarakat yang berbeda-beda menjadi penyebab masuknya politik uang yang menyebabkan beralihnya dukungan anggota kerabat dari figur calon yang berasal dari lingkup kekerabatannya. Kebanyakan masyarakat membutuhkan kontribusi dari calon legislatif baik berupa uang, benda maupun pemberian lain. Rendahnya ekonomi sebagian masyarakat Kecamatan Laonti membuat beberapa calon legislatif memanfaatkan keadaan tersebut dengan melakukan praktik politik uang, sebab politik uang dilakukan di daerah yang tingkat ekonomi masyarakatnya rendah akan cenderung diterima oleh masyarakatnya. Fakta yang terjadi bahwa masyarakat merasa sangat senang dengan pemberian uang secara percuma tanpa harus bekerja. Hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan informan berikut ini:

“masuknya money politik ini menjadi salah satu alasan sehingga kekerabatan tadi ini tidak solid, jadi dia salah satu penyebab dasar. Kenapa? Karna latar belakang ekonomi masyarakat itu berbeda-beda, entahkah kemudian ee... *money politics* nya dalam konteks keuangan artinya orang itu kalo dibawakan bisa mengubah. Jadi kesimpulannya *money politics* itu atau politik uang sangat mempengaruhi ee... dukungan kekerabatan di dalam dinamika politik yang terjadi di Kecamatan Laonti lebih khusus” (Wawancara 6 Juli 2019).

“memang dari faktor ekonomi. Tapi yang harus paham itu pelaku politik jangan istilahnya melihat, oh keadaan di kampung misalnya Loanti melihat momen politik masuk untuk membeli suara atau mengambil suara dengan cara money politik” (Wawancara 13 Agustus 2019).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa politik uang menjadi penyebab tidak solidnya dukungan kekerabatan pada pemilihan calon legislatif di Kecamatan Laonti. Salah satu penyebab mudahnya masyarakat menjadi target politik uang yaitu latar belakang ekonomi yang berbeda-beda sehingga membuat sebagian masyarakat mengharapkan adanya kontribusi berupa pemberian uang dari calon legislatif. Masyarakat akan dengan mudah mendukung calon legislatif yang memberikan uangnya meskipun calon tersebut berasal dari luar lingkup kekerabatannya. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat tidak solid dalam mendukung kerabatnya pada pemilihan calon legislatif di Kecamatan Laonti.

KESIMPULAN

Scott dalam teorinya mengemukakan tentang pola interaksi yang berbeda yakni *Public Transcripts* dan *Hidden Transcripts*. *Public Transcript* yang dimaksud adalah kinerja publik yang disyaratkan dari orang-orang yang tunduk pada bentuk subordinasi sosial yang rumit dan sistematis: pekerja untuk bos, penyewa atau petani bagi pemilik tanah, budak untuk tuannya, seorang anggota dari ras yang tunduk pada salah satu ras yang dominan. Dengan pengecualian yang jarang, tetapi signifikan, kinerja publik bawahan akan hati-hati, ketakutan, dan berkeinginan untuk menjilat, dibentuk untuk menarik harapan para penguasa. Scott menggunakan istilah transkrip publik sebagai cara singkat untuk menggambarkan interaksi terbuka antara bawahan dan mereka yang mendominasi. Transkrip publik, yang tidak menyesatkan secara positif, tidak mungkin menceritakan keseluruhan cerita tentang hubungan kekuasaan. Seringkali demi kepentingan kedua belah pihak untuk secara diam-diam berkonspirasi dalam penyajian yang keliru.

Jika wacana bawahan di hadapan dominan adalah transkrip publik, Scott menggunakan istilah transkrip tersembunyi untuk mengkaraktirasi wacana yang terjadi "di luar panggung", di luar pengamatan langsung oleh pemegang kekuasaan. Transkrip *hidden* dengan demikian turunan dalam arti bahwa itu terdiri dari pidato-pidato di luar panggung, gerakan, dan praktik yang mengkonfirmasi, bertentangan, atau mengubah apa yang saya kurangkan, untuk saat ini, kemungkinan bahwa retransaksi di luar panggung atau pecahnya publik mungkin itu sendiri tipuan yang dirancang. Namun, harus jelas bahwa tidak ada cara yang memuaskan untuk menetapkan secara pasti beberapa realitas dasar atau kebenaran di balik serangkaian tindakan sosial tertentu. Scott juga mengabaikan kemungkinan bahwa pemain tersebut mungkin dapat menyindir ketidaktulusan ke dalam pertunjukan itu sendiri, sehingga mengurangi keasliannya untuk sebagian atau semua pendengarnya muncul dalam transkrip publik.

Praktik politik uang yang terjadi pada pemilihan calon legislatif di Kecamatan Laonti adalah penyebab sehingga calon yang berasal dari Laonti tidak terpilih meskipun memiliki basis masa besar. Masyarakat akan memilih calon legislatif yang memberikan uang meskipun bukan berasal dari Kecamatan Laonti.

Pelaku politik uang pada pemilihan calon legislatif di Kecamatan Laonti menampilkan diri sebagai kalangan atau kelas penguasa yang layak untuk memimpin pola kehidupan yang akan dijalani bersama dan mengendalikan sikap politik masyarakat pada pelaksanaan pemilihan calon legislatif melalui kekuatan uang yang dimilikinya. Kekuatan uang yang dimiliki kelompok tersebut menciptakan dominasi politik di tengah masyarakat, sebab, mereka dapat mengontrol jalannya proses politik dengan jaringan dan kekuatan uang yang dimiliki, serta mampu merebut simpati masyarakat melalui berbagai macam kontribusi yang diberikan. Selain itu, masyarakat yang bersikap apatis dan ingin diuntungkan melalui momen pemilihan legislatif akan menarik perhatian para

calon legislatif agar mendapatkan keuntungan berupa suplay dan pemberian uang yang dikemukakan Scoot sebagai *Public Transcripts*.

Sementara itu, sebagian masyarakat berupaya untuk membangun kekuatan agar tetap konsisten dalam mendukung figurnya yang tampil sebagai calon legislatif dengan cara berkampanye, berkomunikasi, berinteraksi dan bersosialisasi secara tertutup di internal kekerabatan. Komunikasi dan interaksi tersebut dimaksud untuk membuat kekerabatan tetap solid dalam mendukung figur kerabat serta melawan para oknum calon legislatif yang menggunakan politik uang dalam pemilihan legislatif.

Gerakan yang dibangun masyarakat berlangsung secara tertutup serta diluar dari pengawasan calon legislatif dan tim sukses pelaku politik uang sebagai kalangan penguasa, hal ini sesuai dengan apa yang disebut Scoot sebagai wacana yang terjadi "di luar panggung", di luar pengamatan langsung oleh pemegang kekuasaan.

Selain interaksi yang dilakukan diluar pengawasan pelaku politik uang sebagai kalangan penguasa, terdapat pula masyarakat yang secara terbuka mengkampanyekan figurnya yang tampil sebagai calon legislatif dan mengajak anggota kerabat lainnya untuk tidak terpengaruh dengan praktik politik uang yang dilakukan oleh calon lain yang disebut Scoot sebagai bentuk pembangkangan kelas subordinat terhadap kalangan penguasa.

Sosialisasi yang dilakukan dalam internal masyarakat merupakan upaya untuk memenangkan figure yang tampil sebagai calon legislatif serta bertujuan untuk menjaga dukungan dan solidaritas masyarakat Laonti dalam menentukan pilihan. Kesungguhan masyarakat untuk menjaga solidaritas dalam mendukung figurnya dapat dilihat dari keterlibatan mereka sebagai tim sukses. Selain itu, komitmen dalam membangun komunikasi internal masyarakat dibuktikan dengan adanya masyarakat yang berupaya agar tidak terpengaruh dengan politik uang dan tetap memberikan dukungan kepada figurnya yang tampil sebagai kandidat calon legislatif. Komunikasi dan interaksi yang dilakukan masyarakat untuk tetap mendukung anggota figurnya disebut *Hidden Transcripts* dan kelompok masyarakat tersebut bertindak sebagai kelas subordinat.

Beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya praktik politik uang pada pemilihan calon legislatif di Kecamatan Laonti, yaitu ; Minimnya pengetahuan masyarakat tentang politik, keinginan para calon legislatif untuk mendapatkan dukungan secara instan, rendahnya tingkat pendidikan sebagian masyarakat dan ekonomi masyarakat yang kurang mampu.

Hal inilah yang dimanfaatkan oleh para pelaku politik uang untuk bersikap sebagai kalangan penguasa serta membangun legitimasi di tengah-tengah masyarakat Laonti pada pelaksanaan pemilihan calon legislatif bahwa mereka layak untuk dipilih untuk mengendalikan kebijakan pemerintah daerah sebagaimana yang dijelaskan dalam teori Scoot.

DAFTAR PUSTAKA

- Adon Nasrullah Jamaludin.(2015). Sistem Kekerabatan Masyarakat Kampung Sawah Di Kota Bekasi. Bandung : UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Afriana A. Lery. (2016). Sistem Kekerabatan Dalam Penentuan Pilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Majene. Makassar.
- Bahri Kurniawan.(2012). Kekerabatan Dalam Proses Politik Di Masyarakat Desa: Studi Kasus Kepala Parit Dalam Komunitas Parit Di Desa Sungai Besar, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Depok.
- Dendy Lukmajati. (2016). Praktik Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus di Kabupaten Blora). Blora.
- Georges Balandier. 1986. Antropologi Politik. Jakarta : Rajawali.
- Haviland, William A. (1985). Anthropology, Terjemahan R.G. Soekadijo. Jakarta: Erlangga
- Indah Sri Utari. (2016). Pencegahan Politik Uang dan Penyelenggaraan Pilkada yang Berkualitas: Sebuah Revitalisasi Ideologi. Jawa Tengah.
- James C. Scoot. 1990. Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts. Yale University Press.
- Jonasmer Simatupang dan Muhammad Subekhan. (2018). Pengaruh Budaya Politik Uang dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia. Semarang : Universitas Negeri Semarang.
- Koentjaraningrat. (1998). Pengantar Antropologi Jilid 2. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mohamad Amanu. (2015). Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri). Malang.
- Mohammad Nazir. (1988). Metode Penelitian / Mohammad Nazir. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nina Nurdiani. (2014). Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan. Jakarta Barat.
- Patrick Jimrev Rimbing. (2014). Money Politics Dalam Pemilihan Legislatif Di Kota Manado Tahun 2014 (Suatu Studi Di Dapil 1 Kecamatan Sario Dan Kecamatan Malalayang). Manado.
- Rozali. (2015). Fenomena Dinasti Politik Pemerintah Desa (Studi Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Tahun 2012). Tanjungpinang.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. (2006). Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba hingga 1945. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Suyono, Ariyono dan Siregar, Aminuddin. (1985). Kamus Antropologi. Jakarta: Akademika Pressindo.

Titin Purwaningsih. (2015). Politik Kekerabatan Dan Kualitas Kandidat Di Sulawesi Selatan. Yogyakarta.

Nomor 8 Tahun 2012. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 11 Mei 2012. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117. Jakarta.

Nomor 10 Tahun (2016). Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang. 1 Juli 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Jakarta.

Nomor 7 Tahun (2017). Pemilihan Umum. 15 Agustus 2017. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Jakarta.